

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DESA (PADesa), DANA DESA (DD),
ALOKASI DANA DESA (ADD), BAGI HASIL PAJAK RETRIBUSI
(BHPR) DANJUMLAH SAWAH TERHADAP ALOKASI BELANJA
DESA BIDANG PERTANIAN TAHUN 2017
(Studi Empiris di Desa-Desa Kabupaten Wonogiri)**



Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I Pada
Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Disusun Oleh :

REINA SHAFIRA MURTI

B200140232

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2018

HALAMAN PERSETUJUAN

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DESA (PADesa), DANA DESA (DD),
ALOKASI DANA DESA (ADD), BAGI HASIL PAJAK RETRIBUSI
(BHPR) DAN JUMLAH SAWAH TERHADAP ALOKASI BELANJA
DESA BIDANG PERTANIAN TAHUN 2017
(Studi Empiris di Desa-Desa Kabupaten Wonogiri)**

PUBLIKASI ILMIAH

Oleh:

REINA SHAFIRA MURTI

B200140232

Telah diperiksa dan disetujui oleh:

Dosen Pembimbing


Dr. Zulfikar, S.E., M.Si.

HALAMAN PENGESAHAN

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DESA (PADesa), DANA DESA (DD),
ALOKASI DANA DESA (ADD), BAGI HASIL PAJAK RETRIBUSI
(BHPR) DAN JUMLAH SAWAH TERHADAP ALOKASI BELANJA
DESA BIDANG PERTANIAN TAHUN 2017
(Studi Empiris di Desa-Desa Kabupaten Wonogiri)**

Oleh:

REINA SHAFIRA MURTI
B200140232

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada hari Rabu, 31 Januari 2018

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji:

1. Dr. Zulfikar, S.E., M.Si
(Ketua Dewan Penguji)

()

2. Andy Dwi Bayu Bawono, SE., M.Si.Ph.D
(Anggota 1 Dewan Penguji)

()

3. Drs. Atwal Arifin, M.Si, Akt,CA
(Anggota 2 Dewan Penguji)

()

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Muhammadiyah Surakarta



(Dr. Syamsudin, MM)

NIDN. 017025701

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa publikasi ilmiah ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 31 Januari 2018

Penulis



REINA SHAFIRA MURTI
B200140232

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DESA (PADesa), DANA DESA (DD),
ALOKASI DANA DESA (ADD), BAGI HASIL PAJAK RETRIBUSI
(BHPR) DANJUMLAH SAWAH TERHADAP ALOKASI
BELANJA DESA BIDANG PERTANIAN TAHUN 2017
(Studi Empiris di Desa-Desa Kabupaten Wonogiri)**

Abstrak

Tujuan dari penelitian untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Desa (PADesa), Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), Bagi Hasil Pajak dan Retribusi (BHPR), dan Jumlah Sawah terhadap Alokasi Belanja Desa Bidang Pertanian di Kabupaten Wonogiri pada tahun 2017. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh desa yang terletak di Kabupaten Wonogiri yang berjumlah 251 desa. Penelitian ini menggunakan data sekunder dimana data diperoleh langsung dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Wonogiri. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan *purposive sampling* sesuai kriteria-kriteria yang tertentu. Diperoleh sampel 208 desa yang dianalisis dengan metode regresi linier berganda program SPSS 16.00. Hasil penelitian ini diperoleh angka koefisien determinasi dengan *Adjusted R square* sebesar 0,054 atau 5,4%. Hal ini berarti bahwa variabel Alokasi Belanja Desa Bidang Pertanian dapat dijelaskan oleh variabel PADesa, DD, ADD, BHPR, dan JML_SWH (jumlah sawah), sedangkan sisanya 94,6% dijelaskan oleh faktor-faktor diluar variabel yang diteliti. ADD mempunyai pengaruh negatif signifikan terhadap alokasi belanja desa bidang pertanian. Sedangkan PADesa, DD, BHPR, dan Jumlah Sawah tidak berpengaruh signifikan terhadap Alokasi belanja Desa Bidang Pertanian.

Kata Kunci: PADesa, DD, ADD, BHPR, Jumlah Sawah dan Alokasi Belanja Desa Bidang Pertanian.

Abstract

The purpose of this research is to examine an influence of Village Local Revenue (PADesa), Village Fund (DD), Village Allocation Fund (ADD), Tax Revenue and Levy (BHPR), Number of Fields on Agricultural Village Expenditure allocation in Wonogiri Regency in 2017. The population in this research are entire villages located in Wonogiri Regency amounting to 251 villages. This study uses secondary data which data obtained directly from Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Wonogiri and Badan Pusat Statistik Kabupaten Wonogiri. This study used purposive sampling a sampling method according to certain criterias. This study obtained 208 villages as sample and it were analyze by multiple linear regression analysis using SPSS 16.00 program. The result shows that coefficient of determination with Adjusted R square gained 0.054 points or 5.4%. It means that 5.4% variabel variant Agricultural Village Expenditure can be explained by PADesa, DD, ADD, BHPR, meanwhile the rest of 94,6% was explained by other factors. However in partial research shows that ADD has a significant negative effect on agricultural village expenditure

allocation. While PADesa, DD, BHPR, and Number of Fields have no significant effect Agricultural Village Expenditure allocation.

Keywords: *PADesa, DD,ADD,BHPR, Number of Fields and Agricultural Village Expenditure Allocation.*

1. PENDAHULUAN

Sebagai negara agraris, Indonesia sebagian besar penduduknya bermata pencaharian di sektor pertanian dengan didukung kekayaan alam yang dimilikinya. Indonesia memiliki berbagai sektor seiring dengan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki. Sehingga sektor pertanian dijadikan sebagai salah satu sektor dalam memacu pertumbuhan perekonomian di Indonesia. Keberhasilan pembangunan nasional ditentukan oleh keberhasilan dalam pembangunan ekonomi daerah. Potensi yang dimiliki setiap daerah berpengaruh terhadap tingkat pembangunan nasional maupun daerah. Indonesia memiliki peluang dan potensi dalam sektor pertanian dengan didukung kekayaan alam yang melimpah (<http://www.academia.edu>).

Pemerintah Kabupaten Wonogiri memiliki peran dalam mengembangkan ekonomi rakyat pada hasil pertanian untuk meningkatkan nilai tambah perekonomian. Diera otonomi daerah, Pemerintah memiliki keleluasaan dalam kebijakan pembangunan pertanian. Salah satu tujuan pemerintah daerah Kabupaten Wonogiri yakni mengembangkan sarana prasarana, permodalan untuk mendukung hasil sektor pertanian sehingga memiliki keunggulan di bidang pertanian dan dapat menunjang perekonomian. Hal ini sesuai dengan tujuan otonomi daerah yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya (Putro, 2011). Desa merupakan bagian dari daerah otonom terendah dalam sistem Pemerintahan di Indonesia. Dalam era otonomi diharapkan timbul adanya kemandirian desa yang dapat meningkatkan pembangunan desa dalam berbagai sektor yang dapat berkembang atau berpotensi menjadi sumber pendapatan bagi desa (Pelealu, 2013). Berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014 desa memiliki sumber-sumber pendapatan sebagai hak yang dimiliki desa yang harus dikelola dengan baik untuk mewujudkan kewajiban desa berupa Pendapatan Asli Desa (PADesa).

Penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan desa tentunya membutuhkan Dana Desa (DD) yang diperoleh dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Siburian, dkk, 2014). Dengan adanya pemberian alokasi dana desa ini diharapkan bantuan atau dana untuk membiayai dan mewujudkan program pemerintah desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat desa dapat terwujud dengan baik. Dalam meningkatkan keuangan desa di era otonomi desa, pemerintah melakukan berbagai upaya kebijakan mengenai perpajakan daerah. Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten merupakan bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh setiap Kabupaten.

Dalam upaya meningkatkan pendapatan wilayahnya, sektor pertanian memiliki peran penting dalam hal tersebut. Salah satunya di Kabupaten Wonogiri yang memiliki lahan sawah cukup luas yang dapat meningkatkan perekonomian daerahnya. Sehingga desa memiliki peran penting dalam perkembangan program pertanian di masing-masing desa melalui APBDesa. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014, belanja desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan desa yang telah disepakati dalam musyawarah desa dan sesuai dengan prioritas Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah. Rendahnya tingkat kemampuan keuangan yang dimiliki desa dan pemerintah desa, maka desa memperoleh bantuan dari pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten/kota.

Susunan penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembangunan perlu diatur berdasarkan Undang-Undang. Sehubungan dengan hal tersebut peneliti ingin meneliti pada sektor Desa, khususnya mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) yang mana penelitian ini masih jarang dilakukan dan penelitian-penelitian sebelumnya sebagian besar hanya mengupas tentang Daerah atau APBD. Maka dari itu peneliti tertarik untuk meneliti tentang APBDesa karena ingin mengetahui mengenai keuangan desa, seberapa besar pendapatan desa yang diperoleh terhadap belanja desa bidang pertanian dan pemanfaatan potensi pertanian di Kabupaten Wonogiri. Berdasarkan latar belakang di atas yang telah dipaparkan, peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian yang berjudul

“Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Desa (PADesa), Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), Bagi Hasil Pajak dan Retribusi, dan Jumlah Sawah Terhadap Alokasi Belanja Desa Bidang Pertanian Tahun 2017 (Studi Empiris di Desa-Desa Kabupaten Wonogiri)”.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif digunakan untuk menganalisis hubungan antar variabel-variabel dengan didukung teori-teori yang ada.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh desa di Kabupaten Wonogiri yang terdiri dari 251 desa. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling* teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini regresi linier berganda.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pengaruh PADesa terhadap Alokasi Belanja Desa Bidang Pertanian

PADesa memiliki nilai signifikansi sebesar $0,665 > 0,05$ dan nilai t-hitung dan t-tabel sebesar $0,434 < 1,971777$. Hal ini berarti menunjukkan bahwa variabel PADesa tidak berpengaruh signifikan terhadap alokasi belanja desa bidang pertanian. Permendagri No. 113 Tahun 2014, pendapatan asli desa merupakan hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi masyarakat, dan lain-lain pendapatan asli desa. Dalam hal ini pemerintah desa mengutamakan pembangunan infrastruktur. Kemungkinan aliran PADesa belum banyak digunakan untuk alokasi bidang pertanian. Sehingga besarnya PADesa tidak berpengaruh terhadap alokasi belanja desa bidang pertanian.

3.2 Pengaruh Dana Desa (DD) Terhadap Alokasi Belanja Desa Bidang Pertanian

DD memiliki nilai signifikansi sebesar $0,390 > 0,05$ dan nilai t-hitung dan t-tabel sebesar $-0,861 < 1,971777$. Hal ini berarti

menunjukkan bahwa variabel DD tidak berpengaruh signifikan terhadap alokasi belanja desa bidang pertanian. Desa memperoleh bantuan dari pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten/kota berupa dana desa untuk penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan desa dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat, pemberdayaan masyarakat, dan pengelolaan pembangunan berupa dana desa yang diperoleh dari pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten/kota. Dana desa yang ditransfer oleh pemerintah pusat kepada pemerintah kabupaten wonogiri belum dimanfaatkan secara penuh terutama dalam alokasi bidang pertanian, pemerintah lebih fokus terhadap pembangunan fisik dan sarana prasarana. Sehingga kemungkinan dana desa yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah Kabupaten Wonogiri tidak difokuskan untuk belanja desa bidang pertanian.

3.3 Pengaruh Alokasi Dana Desa (ADD) Terhadap Alokasi Belanja Desa Bidang Pertanian

ADD memiliki nilai signifikansi sebesar $0,011 < 0,05$ dan dengan uji-t pengujian dua sisi (*two tails*) dihasilkan nilai t-hitung dan t-tabel sebesar $-2,576 < -1,971777$. Hal ini berarti menunjukkan bahwa variabel ADD mempunyai pengaruh signifikan negatif terhadap alokasi belanja desa bidang pertanian. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, menyatakan bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam APBD kabupaten/kota setelah dikurangi dana alokasi khusus. Alokasi dana desa berasal dari APBD yang bersumber dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota untuk desa paling sedikit 10%. Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa Penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat Desa sebagaimana bersumber dari dana perimbangan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diterima oleh Kabupaten/Kota dan ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota. Terkait dengan hal ini, alokasi dana desa di Kabupaten Wonogiri lebih difokuskan untuk Penghasilan Tetap

(SILTAP). Semakin besar alokasi dana desa, maka semakin besar juga SILTAP untuk kepala desa dan perangkat desa. Sehingga, untuk alokasi belanja desa bidang pertanian hanya diberikan sisanya yang relatif kecil. Maka dari itu, alokasi dana desa berpengaruh negatif terhadap alokasi belanja desa bidang pertanian. Semakin banyak alokasi dana desa maka semakin kecil alokasi belanja desa bidang pertanian.

3.4 Pengaruh Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Terhadap Alokasi Belanja Desa Bidang Pertanian

BHPR memiliki nilai signifikansi sebesar $,070 > 0,05$ dan nilai t-hitung dan t-tabel sebesar $-1,819 < 1,971777$. Hal ini berarti menunjukkan bahwa variabel BHPR tidak berpengaruh signifikan terhadap alokasi belanja desa bidang pertanian. Salah satu sumber pendapatan desa adalah bagi hasil pajak daerah dan retribusi, dimana dana dibagikan dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa sesuai persentase dari hasil kekayaan alam yang dikelola dan pajak yang diterima pemerintah desa. Tetapi, pembagian hasil pajak dan retribusi di Kabupaten Wonogiri menggunakan metode rata-rata sehingga tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari dana bagi hasil pajak dan retribusi terhadap alokasi belanja desa bidang pertanian di Kabupaten Wonogiri.

3.5 Pengaruh Jumlah Sawah Terhadap Alokasi Belanja Desa Bidang Pertanian

Jumlah sawah memiliki nilai signifikansi sebesar $0,271 > 0,05$ dan nilai t-hitung dan t-tabel sebesar $-1,104 < 1,971777$. Hal ini berarti menunjukkan bahwa variabel Jumlah Sawah tidak berpengaruh signifikan terhadap alokasi belanja desa bidang pertanian. Terkait dengan penelitian ini bahwa kepentingan sawah sendiri untuk membuat talud sawah, gorong-gorong, sarana irigasi, dll. Pengeluaran sawah di Kabupaten Wonogiri sangat sedikit dan relatif tidak ada, kemungkinan desa tidak menambah sawah lagi, kecuali desa tersebut membeli sawah. Dalam hal ini jumlah sawah diprosikan dengan Luas Tanah Sawah

Menurut Jenis Pengairan (Ha) dimana gabungan atau jumlah antara Pengairan Teknis, Pengairan ½ Teknis, Pengairan Sederhana. Untuk Kabupaten Wonogiri yang kondisi alamnya sebagian besar merupakan pegunungan berbatu gamping dan ladang. Sehingga, pengalokasian belanja desa tidak diprioritaskan terhadap jumlah sawah di desa-desa Kabupaten Wonogiri.

4. PENUTUP

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis secara parsial variabel Alokasi Dana Desa (ADD) berpengaruh negatif signifikan terhadap Alokasi Belanja Desa Bidang Pertanian. Sedangkan untuk variabel PADesa,DD,BHPR,dan jumlah sawah tidak berpengaruh signifikan terhadap Alokasi Belanja Desa Bidang Pertanian.

Berdasarkan simpulan hasil penelitian, penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, yaitu data yang digunakan adalah dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa bukan Laporan Realisasi Anggaran sehingga data yang diperoleh sampai Desember tahun 2017 belum terkumpul semua, penelitian ini hanya menggunakan < 1 tahun anggaran pendapatan dan belanja desa, data untuk setiap desa yang diperoleh ada yang tidak lengkap dan sesuai dikarenakan sistem pengalokasian datanya belum sesuai dan tidak menggunakan dasar yang jelas dimana telah berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, jumlah sawah merupakan variabel independen yang belum pernah digunakan sehingga masih terdapat kekurangan dalam penelitian ini.

Berdasarkan simpulan dan keterbatasan dalam penelitian ini, peneliti memberikan saran-saran yang dapat meningkatkan kualitas penelitian selanjutnya. Terdapat beberapa saran, yaitu penelitian selanjutnya sebaiknya menggunakan Laporan Realisasi Anggaran sehingga data yang diperoleh sampai Desember lengkap dan sesuai, penelitian selanjutnya sebaiknya menggunakan lebih dari satu tahun Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sehingga dapat diketahui kecenderungan hasil penelitiannya, penelitian selanjutnya sebaiknya menggunakan data desa yang sesuai dengan dasar-dasar yang telah dilakukan

sebagaimana tercantum pada Undang-Undang No. 6 Tahun 2014, bagi peneliti selanjutnya sebaiknya menambahkan variabel lainnya agar lebih mengetahui faktor lainnya yang mempengaruhi Alokasi Belanja Desa

DAFTAR PUSTAKA

- Ghozali, Imam. 2011. “Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 19 (edisi kelima)”. Semarang : Universitas Diponegoro.
- Lind, Marchal, and Wathen. 2014. “*Statistical Techniques In Business and Economics*”. Jakarta: Salemba Empat. Edisi 15.
- Pelealu, Andreas Marzel. 2013. “ Pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Modal Pemerintah Kota Manado Tahun 2003-2012”. *Jurnal EMBA, Vol 1, No 4*, Desember 2013, ISSN: 2303-1174 hal 1189-1197.
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 79 Tahun 2013 tentang Pedoman Kesesuaian Lahan Pada Komoditas Tanaman Pangan
- Permendagri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa.
- Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Permendes Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Penetapan Prioritas, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi.
- Putro, Bagus Sugiarto. 2011. “Peran Sektor Pertanian Dalam Perekonomian Di Kabupaten Wonogiri”. *Skripsi*. Surakarta: Fakultas Pertanian Universitas Sebelas Maret.
- Rencana Strategis (RENSTRA) Kementrian Pertanian Tahun 2015-2019.
- Siburian, Edita D.B,dkk. 2014. “Peranan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dalam Pengembangan Wilayah Perdesaan Di Kabupaten Serdang Bedagai”. *Jurnal Ekonom, Vol 17, No 2*, April 2014.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Wardhana, Bramudya Wisnu. 2017. “Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Desa (PADesa), Dana Desa (DD), dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Terhadap Belanja Desa Bidang Pertanian Tahun 2016 (Studi Empiris di Seluruh Desa se-Kabupaten Sukoharjo)”. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.

<https://wonogirikab.bps.go.id/>, diakses 19-08-2017

<http://www.academia.edu> , diakses 19-08-2017